



Pengaruh Eksternalitas Negatif dan Positif dalam Kebijakan Ekonomi Publik

Gege Laudie^{1*}, Briean Sandika Arjuna², Fawwaz Ghufuran³, Wahjoe Pangestoeti⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email : glaudie@student.umrah.ac.id¹, bsarjuna@student.umrah.ac.id², fghufuran@student.umrah.ac.id³,
wpangestoetilecture@gmail.com⁴

Alamat: Jalan Raya Dompok Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau 29124, Indonesia.

Korespondensi penulis: glaudie@student.umrah.ac.id*

Abstract. *This study aims to analyze how negative and positive externalities influence the effectiveness of public economic policies at the regional level. Using a qualitative approach and descriptive-analytical method, the research was conducted in Tanjungpinang City through document studies, focus group discussions (FGDs), and content analysis of policy documents and scholarly literature. The findings reveal that negative externalities such as environmental pollution, traffic congestion, and industrial waste have not been optimally addressed due to weak regulation and limited policy evaluation. Conversely, positive externalities like the development of green open spaces and the provision of public education lack adequate fiscal support. Public policy interventions are predominantly disincentive-based, such as taxation and sanctions, while mechanisms to incentivize socially beneficial activities remain limited. These findings are examined through the lenses of Pigouvian Tax and Coase Theorem, emphasizing the need for evidence-based policies that internalize externalities fairly and efficiently. The study recommends improving regulatory frameworks, implementing strategic fiscal incentives, and enhancing public literacy in externality management.*

Keywords: *externalities, fiscal incentives, Pigouvian tax, public policy, social equity.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eksternalitas negatif dan positif mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi publik di tingkat daerah. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian dilakukan di Kota Tanjungpinang melalui studi dokumentasi, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan analisis konten terhadap dokumen kebijakan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksternalitas negatif, seperti pencemaran lingkungan, kemacetan, dan limbah industri, belum ditangani secara optimal karena lemahnya regulasi dan minimnya evaluasi kebijakan. Sebaliknya, eksternalitas positif seperti pembangunan ruang terbuka hijau dan penyediaan pendidikan publik masih kurang mendapat dukungan fiskal yang memadai. Intervensi kebijakan publik lebih dominan dalam bentuk disinsentif seperti pajak dan sanksi, sementara mekanisme insentif untuk mendorong aktivitas positif masih terbatas. Temuan ini dianalisis melalui teori Pigouvian Tax dan Coase Theorem, serta menunjukkan perlunya kebijakan berbasis bukti yang mampu menginternalisasi dampak eksternalitas secara adil dan efisien. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan melalui peningkatan regulasi, insentif fiskal yang strategis, serta peningkatan literasi publik dalam pengelolaan eksternalitas.

Kata Kunci: eksternalitas, insentif fiskal, pajak Pigouvian, kebijakan publik, ekuitas sosial.

1. PENDAHULUAN

Eksternalitas dampak ekonomi yang tidak tercermin dalam harga pasar merupakan salah satu kendala klasik dalam ekonomi publik. Dalam ekologi pasar sempurna, biaya dan manfaat dari setiap transaksi seharusnya menembus sepenuhnya ke pihak-pihak yang bertransaksi. Namun, dalam kenyataannya, sering muncul dampak tambahan yang tidak terhitung secara langsung, baik berupa eksternalitas negatif seperti polusi udara dan kemacetan jalan, maupun eksternalitas positif seperti peningkatan kesehatan publik dari imunisasi massal.

Secara global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa polusi udara bertanggung jawab atas 7 juta kematian dini setiap tahun, sedangkan imunisasi rutin telah menurunkan angka kematian anak sebesar 45% dalam dua dekade terakhir. Data tersebut menegaskan bahwa eksternalitas tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak luas pada kesehatan, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks ekonomi publik, eksternalitas memegang posisi strategis karena memengaruhi efisiensi alokasi sumber daya dan keadilan distribusi. Eksternalitas negatif menyebabkan pasar gagal (*market failure*), karena pelaku ekonomi tidak menanggung penuh biaya sosial dari tindakannya; misalnya, pabrik yang mengeluarkan limbah tanpa penanggungjawab penuh pada pencemaran sungai dan masalah kesehatan masyarakat. Di sisi lain, eksternalitas positif, misalnya manfaat kolektif dari pendidikan dasar universal, sering kali tidak mampu disediakan optimal oleh pasar karena sulitnya eksklusi dan rivalitas (Barang Publik). Kondisi ini membuka ruang bagi intervensi pemerintah melalui kebijakan ekonomi publik baik berupa regulasi, insentif fiskal, maupun penyediaan langsung barang dan jasa publik.

Kondisi di Indonesia menggambarkan realitas eksternalitas secara nyata. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2024), lebih dari 60% sungai besar di Jawa tercemar berat akibat limbah industri dan domestik, menyebabkan biaya kartu kesehatan masyarakat meningkat sekitar 15% dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, Program Imunisasi Nasional (2023) mencatat peningkatan cakupan imunisasi anak dari 85% (2015) menjadi 95% (2022), yang berkorelasi dengan penurunan insiden difteri dan polio sebesar 78% dalam periode tersebut. Data sejenis juga muncul dalam sektor lain: studi Harish, M & Diana Sapha AH (2019) mencatat bahwa penggunaan kendaraan pribadi di Banda Aceh menimbulkan biaya eksternal berupa kemacetan dan polusi hingga Rp 10.000 – 15.000 per kendaraan per hari, mempengaruhi produktivitas kota mencapai Rp 5,5 miliar per tahun.

Permasalahan penelitian ini berakar pada ketidakseimbangan antara eksternalitas negatif dan positif dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan publik. Pertanyaannya adalah: sejauh mana dampak eksternalitas baik negatif maupun positif mempengaruhi efektivitas kebijakan ekonomi publik di Indonesia, dan bagaimana *policy-makers* merancang intervensi yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial? Indikasi bahwa intervensi belum optimal tampak dari masih tingginya angka pencemaran dan kesenjangan cakupan layanan publik, disertai keluhan masyarakat terhadap ketidaktepatan alokasi anggaran. Menurut Awaliah Arisyah & Hendra Riofita (2025), optimalisasi kebijakan publik yang efektif terhadap eksternalitas masih terkendala lemahnya penerapan pajak

Pigouvian dan minimnya pemberian insentif pada eksternalitas positif. Sementara Hanafiyah dkk. (2024) menunjukkan bahwa carbon tax efektif namun implementasinya belum merata, khususnya pada sektor industri menengah dan kecil.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi, mengingat konteks Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang memperjuangkan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) menjadi keharusan untuk menghindari distorsi dan ketidakefisienan akibat penyalahgunaan anggaran atau regulasi yang tidak tepat sasaran. Sektor publik harus mampu mengenali dan menangani eksternalitas secara sistematis: memberlakukan regulasi ketat pada eksternalitas negatif (misalnya karbon) dan secara bersamaan mendorong aktivitas yang menghasilkan eksternalitas positif (pendidikan, kesehatan, inovasi). Kondisi pandemi COVID-19 juga memperlihatkan kesenjangan dalam respons kebijakan, terutama terhadap masyarakat rentan (Kurniawansyah dkk., 2020). Oleh karena itu, penyusunan kebijakan dalam penelitian ini dirancang untuk memberikan panduan konkret, bukan sekadar rekomendasi umum.

Secara akademik, kajian ini melengkapi literatur sebelumnya yang telah membahas eksternalitas dalam berbagai konteks. (Fadilah, 2024) menekankan perlunya regulasi sinergis antara pemerintah dan industri untuk mengatasi polusi; Melsha & Noor (2025) menyoroti pentingnya pengelolaan limbah kayu industri melalui pengayaan ekonomi sirkular. Studi Hubah (2023) pun memperkuat urgensi pajak karbon yang beban sosialnya adil. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih terfokus pada kasus sektoral, sedangkan penelitian ini hendak menjembatani dan menggeneralisasi pengaruh eksternalitas dalam dimensi kebijakan publik secara keseluruhan mencakup barang publik, redistribusi pendapatan, dan mekanisme pajak progresi (Awaliah Arisyah & Hendra Riofita, 2025). Gap ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan kajian empiris menyeluruh yang mengkaji efek eksternalitas dalam keseluruhan kerangka ekonomi publik.

Dari sisi teori, landasan Pigouvian Tax menegaskan bahwa pemerintah dapat memperbaiki eksternalitas negatif melalui pajak yang sama besarnya dengan biaya sosial marginal; sebaliknya, Coase Theorem memandang bahwa solusi eksternalitas dapat ditemukan melalui negosiasi antar pihak, asalkan kepemilikan hak jelas dan biaya transaksi rendah. Pada sisi lain, teori kesejahteraan ekonomi menekankan bahwa intervensi publik bertujuan mencapai pareto optimum atau setidaknya kondisi yang lebih baik secara kolektif. Ketika eksternalitas bermajjar, pasar tidak mencapai efisiensi, dan peran negara menjadi penting untuk melaksanakan internalisasi biaya dan manfaat melalui regulasi, subsidi, atau penyediaan langsung barang publik.

Dengan konteks teoritis dan empiris di atas, penelitian ini bertujuan menelaah lebih dalam bagaimana eksternalitas negatif dan positif mempengaruhi perumusan serta implementasi kebijakan ekonomi publik terutama menyangkut penetapan pajak, subsidi sosial, pengaturan lingkungan, dan penyediaan layanan publik. Diharapkan, studi ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang operasional dan didukung data, sekaligus menawarkan kerangka evaluasi model kebijakan ekonomi publik dalam menghadapi eksternalitas secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana eksternalitas negatif dan positif memengaruhi perumusan serta implementasi kebijakan ekonomi publik di tingkat lokal. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta praktik kebijakan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti menangkap dinamika sosial dan politik di balik kebijakan publik secara lebih kontekstual dan mendalam.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan karakteristik kota sebagai pusat pemerintahan daerah yang mengalami berbagai bentuk eksternalitas baik dari aktivitas industri, transportasi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Bertepatan dengan masa penyusunan dan evaluasi kebijakan fiskal daerah yang terkait dengan pengendalian dampak lingkungan dan penguatan layanan publik.

Subjek penelitian terdiri atas tiga kategori utama: pejabat publik, termasuk aparatur perencana dan pengelola kebijakan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan instansi teknis terkait lainnya, akademisi dari perguruan tinggi lokal yang memiliki kajian di bidang ekonomi publik, tata ruang, dan lingkungan, dan masyarakat terdampak, khususnya yang berada di sekitar kawasan industri, pemukiman padat, dan wilayah yang menerima manfaat dari kebijakan sosial. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dan snowball sampling untuk memastikan keberagaman perspektif serta relevansi pengalaman dengan fokus penelitian.

Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah telaah terhadap literatur akademik dan dokumen kebijakan yang relevan. Peneliti memanfaatkan berbagai artikel jurnal ilmiah sebagai bahan analisis, terutama yang telah dipublikasikan dalam lima tahun terakhir dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik eksternalitas serta kebijakan publik. Kajian

terhadap literatur ini membantu membangun pemahaman teoritik sekaligus sebagai alat triangulasi terhadap data lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, focus group discussion (FGD), dan analisis konten. Studi dokumentasi mencakup pengumpulan dan penelaahan terhadap dokumen kebijakan daerah seperti Peraturan Daerah (Perda), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan laporan tahunan dari instansi terkait. Sementara itu, FGD dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan dari ketiga kelompok subjek penelitian guna menggali perspektif yang beragam dan interaktif tentang bagaimana eksternalitas dipersepsi dan ditangani oleh pemerintah maupun masyarakat. Analisis konten digunakan untuk mengkaji narasi kebijakan, wacana publik dalam media lokal, serta tren diskusi dalam jurnal ilmiah yang menjadi acuan. Seluruh data dianalisis secara induktif, dimulai dari pengorganisasian informasi ke dalam kategori tematik, pengkodean data secara manual dan digital (menggunakan software analisis kualitatif), hingga interpretasi makna dalam konteks kebijakan ekonomi publik. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta member checking kepada beberapa informan kunci guna memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi dan realitas empiris. Dengan pendekatan ini, diharapkan temuan yang dihasilkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai pengaruh eksternalitas terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang aplikatif bagi pemerintah daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena eksternalitas dalam ekonomi publik terus menjadi perhatian utama dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan. Eksternalitas negatif, seperti pencemaran udara dan kemacetan lalu lintas, memberikan beban sosial yang tinggi, sedangkan eksternalitas positif, seperti investasi pada pendidikan dan pembangunan infrastruktur umum, sering kali tidak dihargai secara optimal oleh pasar. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan daerah, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta kajian literatur yang relevan, dan digunakan untuk menilai sejauh mana eksternalitas memengaruhi arah dan efektivitas kebijakan ekonomi publik, khususnya di wilayah Tanjungpinang.

a) Eksternalitas Negatif dalam Kebijakan Ekonomi Publik

Temuan awal menunjukkan bahwa eksternalitas negatif merupakan tantangan paling signifikan dalam konteks kebijakan lokal. Di Tanjungpinang, salah satu bentuk nyata eksternalitas negatif adalah pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga dan kegiatan

industri skala kecil. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 40% sampah rumah tangga tidak dikelola secara optimal, yang berdampak pada kualitas air dan kesehatan lingkungan permukiman padat. Hal ini diperparah dengan meningkatnya aktivitas transportasi pribadi yang menyebabkan kemacetan parah di jalur utama kota selama jam sibuk, terutama di sekitar kawasan pendidikan dan pasar tradisional.

Fenomena ini selaras dengan studi Harish, M & Diana Sapha AH (2019) yang menemukan bahwa penggunaan transportasi pribadi secara masif di Kota Banda Aceh menciptakan beban eksternal berupa polusi udara, waktu tempuh yang membengkak, serta peningkatan konsumsi bahan bakar. Penelitian tersebut mencatat bahwa nilai kerugian ekonomi akibat waktu produktif yang hilang dan dampak kesehatan mencapai Rp 5,5 miliar per tahun. Angka tersebut mencerminkan bahwa biaya sosial eksternalitas tidak pernah ditanggung langsung oleh pelaku, melainkan dibebankan pada masyarakat secara kolektif.

Selain transportasi dan limbah, pencemaran udara dari aktivitas pembakaran lahan dan emisi kendaraan juga menjadi sumber eksternalitas negatif yang kerap diabaikan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah daerah cenderung reaktif, bukan preventif. Fadilah (2024) dalam kajiannya mengenai polusi industri menemukan bahwa lemahnya regulasi pengawasan menyebabkan meningkatnya risiko kesehatan masyarakat di sekitar kawasan industri. Mereka menekankan pentingnya sistem monitoring yang lebih ketat serta penerapan sanksi administratif yang jelas terhadap pelanggaran lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa eksternalitas negatif hanya dapat dikendalikan secara efektif jika diimbangi oleh kebijakan yang kuat dan konsisten.

Dalam kasus serupa, Melsha & Noor (2025) mencatat bahwa limbah produksi kayu pada perusahaan meubel di wilayah pesisir menyebabkan penurunan kualitas udara dan air, serta menimbulkan konflik horizontal antara pengusaha dan masyarakat sekitar. Ketidaktepatan alokasi anggaran dalam pengelolaan limbah serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama. Dengan demikian, eksternalitas negatif tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi.

b) Eksternalitas Positif: Pengaruh dan Hambatan

Berbeda dengan eksternalitas negatif, eksternalitas positif sering kali tidak mendapat perhatian yang setara dalam proses kebijakan. Padahal, kegiatan seperti pembangunan infrastruktur umum, penyediaan pendidikan dasar, dan layanan kesehatan preventif menghasilkan manfaat sosial yang jauh lebih besar daripada manfaat privat. Dalam konteks ini, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan ruang

terbuka hijau (RTH) di Tanjungpinang berkontribusi besar terhadap peningkatan mobilitas dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, investasi pemerintah dalam sektor ini belum optimal secara fiskal.

Irawan & Meliyana (2025) menyoroti hal serupa dalam studi kasus Taman Bersemi STQ, di mana ruang publik multifungsi berhasil meningkatkan interaksi sosial, estetika kota, dan nilai properti sekitar. Namun, kurangnya pembiayaan berkelanjutan dan ketergantungan pada APBD menjadi hambatan utama dalam mempertahankan keberlanjutan manfaat tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa eksternalitas positif memerlukan strategi fiskal yang mendorong insentif jangka panjang, baik melalui kerjasama pemerintah-swasta maupun pembiayaan alternatif.

Dalam sektor pendidikan, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan mutu layanan dasar melalui program beasiswa dan penyediaan sarana belajar. Namun, dalam praktiknya, hasil yang dicapai belum sebanding dengan dana yang dikeluarkan. Arini & Riofita (2025) menegaskan bahwa peran kebijakan publik dalam mendukung eksternalitas positif masih kurang tajam, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung pendidikan berbasis komunitas.

Kebijakan fiskal yang diterapkan sejauh ini belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan insentif bagi kegiatan dengan dampak positif terhadap masyarakat luas. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah masih dominan bersifat administratif dan reaktif terhadap kebutuhan jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nilai sosial dari eksternalitas positif belum diinternalisasi dalam sistem perencanaan anggaran.

c) Intervensi Pemerintah: Insentif, Disinsentif, dan Efektivitasnya

Kebijakan pemerintah untuk mengintervensi eksternalitas terbagi dalam dua pendekatan: penggunaan disinsentif (misalnya pajak, denda, dan sanksi hukum) untuk mengurangi eksternalitas negatif, dan insentif (subsidi, fasilitas, atau pembebasan pajak) untuk mendorong eksternalitas positif. Dalam praktiknya, pendekatan disinsentif lebih banyak diterapkan, terutama melalui regulasi lingkungan, sementara insentif masih terbatas pada sektor tertentu.

Menurut Hubah (2023), penerapan pajak karbon di Indonesia masih terbatas pada sektor energi dan belum menyentuh sektor industri skala menengah. Pajak ini, meski efektif secara teoritis, belum mampu menurunkan emisi secara signifikan karena belum diikuti oleh perubahan perilaku pelaku industri. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan disinsentif harus diiringi oleh mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat agar tidak hanya menjadi simbolik. Sebaliknya, Arini & Riofita (2025) mengusulkan model kebijakan fiskal berbasis

insentif yang lebih progresif untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur hijau. Mereka menekankan pentingnya keberanian politik pemerintah untuk merancang pajak progresi yang mampu mendanai eksternalitas positif. Dalam konteks ini, redistribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Dari hasil FGD dengan pejabat daerah di Tanjungpinang, ditemukan bahwa masih ada keterbatasan dalam pemahaman teknis terhadap desain insentif fiskal yang efektif. Sebagian besar kebijakan anggaran disusun dengan pendekatan linier, tanpa mempertimbangkan potensi eksternalitas dari setiap kegiatan. Hal ini menyebabkan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya dan kegagalan dalam mengoptimalkan manfaat sosial.

d) Diskusi Teoretis: Pigouvian Tax dan Coase Theorem

Temuan-temuan tersebut sejalan dengan dua teori utama dalam analisis eksternalitas. Pertama, teori Pigouvian Tax mengusulkan bahwa eksternalitas negatif dapat dikoreksi melalui pungutan pajak setara dengan biaya sosial marginal dari aktivitas tersebut. Dalam konteks Indonesia, pajak karbon merupakan implementasi awal dari konsep ini. Hanafiyah dkk. (2024) mengungkapkan bahwa pajak karbon telah memberikan insentif bagi industri besar untuk beralih ke energi bersih, meskipun masih memerlukan penguatan dalam regulasi dan pengawasan.

Kedua, pendekatan Coase Theorem menyarankan bahwa eksternalitas dapat diselesaikan melalui negosiasi antara pihak yang terlibat, asalkan hak kepemilikan jelas dan biaya transaksi rendah. Namun, dalam realitas kebijakan di Tanjungpinang dan daerah lainnya di Indonesia, teori ini sulit diterapkan karena lemahnya kepastian hukum, rendahnya literasi kebijakan di masyarakat, serta tingginya biaya transaksi sosial-politik. Meski demikian, beberapa upaya negosiasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah menunjukkan bahwa pendekatan ini masih mungkin dilakukan dalam konteks tertentu (Melsha & Noor, 2025).

e) Studi Kasus Lokal: Taman Kota dan Industri Meubel

Studi kasus Taman Bersemi STQ menunjukkan bagaimana eksternalitas positif dapat diperkuat melalui intervensi publik yang tepat. Menurut Falkner (2014), pembangunan taman tersebut meningkatkan kualitas udara, memperluas ruang interaksi sosial, dan mendorong tumbuhnya UMKM di sekitar lokasi. Sayangnya, tidak semua proyek serupa memiliki efek multiplikasi seperti ini, terutama bila tidak disertai partisipasi masyarakat sejak perencanaan.

Sebaliknya, studi kasus industri meubel di kawasan pesisir Tanjungpinang menggambarkan sisi gelap dari eksternalitas negatif. Limbah kayu yang tidak diolah dengan baik mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah kesehatan warga sekitar. Pemerintah daerah telah mengeluarkan Surat Edaran tentang pengelolaan limbah, namun tidak memiliki daya paksa yang cukup kuat karena tidak dibarengi pengawasan lapangan (Melsha & Noor, 2025).

f) Implikasi terhadap Efisiensi dan Keadilan Sosial

Implikasi dari temuan ini sangat jelas: eksternalitas memengaruhi baik efisiensi pasar maupun keadilan sosial. Eksternalitas negatif menyebabkan ketidakefisienan karena biaya sosial tidak ditanggung oleh pelaku, sementara eksternalitas positif terhambat karena manfaat sosial tidak dihargai oleh pasar. Ketika kebijakan publik tidak mampu menginternalisasi eksternalitas secara memadai, maka negara gagal menjalankan fungsi korektifnya.

Dalam pandangan Arisyah dan Riofita (2025), keadilan sosial harus menjadi orientasi utama kebijakan publik. Redistribusi pajak dan pembiayaan sektor sosial perlu dirancang untuk menutupi kesenjangan yang diakibatkan oleh eksternalitas. Kurniawansyah dkk. (2020) menambahkan bahwa penanganan eksternalitas dalam konteks pandemi COVID-19 membuktikan bahwa negara harus hadir secara proaktif untuk melindungi kelompok rentan.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan:

- 1) Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi tentang eksternalitas negatif dengan membentuk satuan tugas khusus lintas sektor.
- 2) Insentif fiskal untuk kegiatan yang menghasilkan eksternalitas positif harus diperluas, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ruang publik.
- 3) Implementasi pajak Pigouvian harus disertai evaluasi periodik dan sistem pemantauan terintegrasi.
- 4) Pemerintah dapat mengembangkan mekanisme kolaboratif berbasis prinsip Coase antara pelaku usaha dan komunitas lokal.
- 5) Literasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan eksternalitas harus ditingkatkan melalui pendidikan publik yang terstruktur.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa eksternalitas, baik yang bersifat negatif maupun positif, memainkan peran signifikan dalam membentuk arah dan efektivitas kebijakan ekonomi publik di tingkat daerah. Eksternalitas negatif, seperti pencemaran lingkungan,

kemacetan lalu lintas, serta limbah industri, telah terbukti menciptakan beban sosial dan ekonomi yang luas, sementara eksternalitas positif, seperti pembangunan ruang publik dan investasi pendidikan, belum memperoleh perhatian dan penguatan kebijakan yang sepadan. Ketimpangan penanganan ini mencerminkan belum optimalnya peran pemerintah dalam melakukan internalisasi terhadap dampak-dampak eksternal tersebut.

Secara substantif, jawaban atas permasalahan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh eksternalitas terhadap kebijakan publik belum sepenuhnya direspons dengan pendekatan sistemik dan berbasis bukti. Kebijakan intervensi yang berbasis disinsentif, seperti pajak dan sanksi, telah diterapkan namun masih lemah dalam implementasi teknisnya. Di sisi lain, strategi insentif yang seharusnya mampu mendorong perilaku sosial-ekonomi yang produktif dan berkelanjutan belum banyak digunakan secara strategis. Keberadaan regulasi masih cenderung bersifat reaktif daripada antisipatif. Hal ini terlihat pada lemahnya pengawasan terhadap dampak eksternalitas negatif seperti limbah industri dan ketidakefektifan program pendukung bagi eksternalitas positif seperti penguatan pendidikan komunitas (Arini & Riofita, 2025; Melsha & Noor, 2025; Harish & AH, 2019).

Dalam kerangka teori Pigouvian Tax, penerapan pajak karbon dan pungutan lingkungan yang setara dengan dampak sosialnya menunjukkan potensi besar dalam internalisasi biaya eksternalitas negatif, sebagaimana tercermin dalam studi Hanafiyah dkk. (2024) dan Hubah (2023). Sementara itu, penerapan Coase Theorem di Indonesia masih menghadapi hambatan kelembagaan dan kultural, seperti tingginya biaya transaksi sosial dan lemahnya kepastian hukum, yang membuat pendekatan berbasis negosiasi sulit diimplementasikan secara luas. Kendati demikian, ada potensi penerapan secara terbatas melalui kemitraan pemerintah-swasta dan pendekatan partisipatif masyarakat lokal, sebagaimana ditunjukkan oleh studi Falkner (2014) dan Irawan & Meliyana (2025).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, disarankan agar kebijakan ekonomi publik diarahkan untuk memperkuat mekanisme insentif terhadap kegiatan yang menghasilkan eksternalitas positif melalui perluasan pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan berbasis komunitas. Di sisi lain, pendekatan disinsentif perlu diperkuat tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga sistem pemantauan dan sanksi yang terintegrasi. Pemerintah daerah perlu mengembangkan unit analisis kebijakan eksternalitas secara lintas sektor agar kebijakan yang disusun dapat memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap efisiensi dan keadilan sosial (Awaliah Arisyah & Riofita, 2025; Kurniawansyah dkk., 2020). Terakhir, literasi publik tentang peran eksternalitas dalam kehidupan sehari-hari harus ditingkatkan melalui kampanye pendidikan kebijakan publik yang sistematis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, D. S. P., & Riofita, H. (2025). Peran kebijakan pemerintah dalam menangani eksternalitas. *Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi*, 8(5), 129–133.
- Arisyah, A., & Riofita, H. (2025). Optimalisasi kebijakan ekonomi publik dalam mengatasi eksternalitas, barang publik, redistribusi pendapatan, dan penerapan pajak progresif. *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 260–271.
- Dwiastuti, R. (2017). *Metode penelitian sosial ekonomi pertanian: Dilengkapi pengenalan metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi kuantitatif-kualitatif*. Universitas Brawijaya Press.
- Fadilah, T. F. (2024). Dampak polusi industri XYZ sebagai risiko eksternalitas. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 10(11), 31–40.
- Falkner, R. (2014). Global environmental politics and energy: Mapping the research agenda. *Energy Research & Social Science*, 1, 188–197.
- Hanafiyah, A., Dewi, A. J., & Purba, F. (2024). Pengentasan eksternalitas negatif terhadap lingkungan melalui carbon tax guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. *JEMAP*, 7(1), 91–105.
- Harish, M., & Ah, D. S. (2019). Eksternalitas negatif penggunaan transportasi pribadi di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 19–28.
- Hidayat, A. N., & Juliannisa, I. A. (2024). *Buku ajar ekonomi publik dan kesehatan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hubah, S. V. (2023). Eksternalitas penetapan kebijakan pajak karbon di Indonesia. *Media Riset Ekonomi (Mr.Eko)*, 2(3), 131–145.
- Irawan, A. F., & Meliyana, N. (2025). Barang publik dan eksternalitas: Tinjauan ekonomi, kebijakan publik, dan perspektif Islam dalam pengelolaan sumber daya (Studi kasus Taman Bersemi STQ). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(4), 336–350.
- Kurniawansyah, H., Salahuddin, M., & Nurhidayati, S. (2020). Konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari COVID-19 pada masyarakat rentan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 130–139.
- Melsha, H. N., & Noor, A. (2025). Eksternalitas limbah produksi kayu pada perusahaan meubel. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 27(2), 252–259.
- Rawung, S. S., Rumagit, M. C., & Supriyanto, S. (2024). *Buku ajar ekonomi publik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Widyastuti, T. V. (2023). *Problematisasi perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif perdagangan internasional*. Penerbit NEM.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.